



Media: Koran Tempo

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Maret 2017

Halaman: 11

Balai Besar Serayu-Opak Enggan Perbaiki Talut Code

Warga diminta ikut program Mundur, Munggah, Madhep Kali.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSO) berkukuh menyatakan tidak akan membangun kembali talut yang longsor di Kali Code. Kawasan bantaran kali itu akan dibiarkan seperti apa adanya agar tak ada lagi yang mendirikan bangunan di atasnya. "Mungkin hanya kami bersihkan," kata Kepala BBWSO, Tri Bayu

Adji, kemarin. Tri mengatakan sejumlah bangunan di tepi Kali Code dekat dengan bibir sungai. Ia memastikan pendirian bangunan-bangunan itu melanggar peraturan tentang sempadan sungai. Peraturan tersebut terbit belakangan setelah maraknya permukiman di bantaran sungai, sehingga bangunan tersebut dalam *status quo*. Karena itulah, kata Tri, BBWSO juga tidak akan menindak permukiman itu. Tri mengatakan pihaknya

masih menyelidiki siapa pembangun talut yang ambrol pada Senin lalu tersebut. Longsornya talut di Kampung Blimbingsari, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, itu mengakibatkan sekitar sembilan keluarga mengungsi.

Atas terjadinya bencana tersebut, Tri menyarankan warga di bantaran sungai di Yogyakarta, khususnya Code, Winongo, dan Gadjah Wong, agar mengikuti program Mundur, Munggah, Madhep Kali. Program pemerintah daerah itu menghendaki bangunan rumah di bibir sungai dimundurkan, dibuat bertingkat, dan menghadap sungai.

Aktivis Kali Code, Totok Pradopo, menuturkan bahwa kawasan kali tersebut semakin kumuh. Warga yang menempati bantaran sungai pun kian banyak. Akibatnya, sempadan sungai digunakan untuk permukiman. "Untuk mendorong masyarakat memundurkan permukimannya agar sempadan aman, jelas sulit tanpa stimulan. Butuh rumah tinggal alternatif," ujarnya.

1.
2.
3.
4.
5.

Totok mendesak agar rencana pembangunan rumah susun Gemawang di kawasan bantaran Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman, bisa segera terwujud. Rusun yang didirikan di lahan seluas sekitar 5.700 meter persegi

itu bisa menjadi tempat relokasi warga bantaran Code. "Kampung bantaran Code selalu menjadi langganan banjir," ujarnya.

Totok juga meminta pemerintah DIY segera memberi akses dan legitimasi bagi forum warga bantaran sungai untuk mewujudkan kampung vertikal di kawasan Code. "Dengan model kepemilikan sertifikat bersama untuk menghindari jual-beli lahan yang mengancam kawasan sungai," tuturnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menuturkan belum berencana menginstruksikan relokasi bagi warga bantaran

Kali Code menyusul ambrolnya talut sungai itu. Ia masih menunggu penanganan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan BBWSO.

Menurut Sultan, relokasi bukanlah pilihan yang mudah. "Kalau warga diminta pindah dari bantaran juga *durung karuan gelem* (belum tentu mau)," ujarnya. Ia mengatakan program percontohan relokasi di Gemawang akan dimulai tahun depan. "Pembebasan lahan Gemawang ini sudah selesai dan mulai dibangun, ini nanti untuk contoh (mere-lokasi warga bantaran Code)," ucapnya.

• PRIBADI WIGANSONO

Yogyakarta,
Pir. Kepala
Sleman

Lanjutan

anggap
tahu
rs

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005